

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL UJIAN NASIONAL DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Muhammad Nur

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

## Abstract

*This research was aimed to know how the Implementation Analysis of Authorized Realization and National Examination Result Analysis in Palu City. This research is a qualitative research. The informant of the research was the District Head of Palu city, head master, Head of Committee/Secretary of National Examination, teachers and students' parents, whereas the sample was drawn purposively which was 7 persons. Data collection method was through observation, interview and documentation. Meanwhile the technique of data analysis used qualitatively. The research used Merilee S. Grendle theory. First, the respect of society toward the orientation and government decision, all respondents accepted the result of national examination conducted but most of them wanted that the determination of national examination given to the school authorization. Second, there is a awareness to accept the authorization, all respondents accepted well the conducting of national examination and there has not been yet another model to replace the national examination. Third, there is a public interest; an authorization if it is on the people side then it has fulfilled the public interest. All respondent told that it has fulfilled. Fourth, there is a law sanction, all respondents told we must follow the rule existed on national examination. Fifth, there is a personal interest on the realization of national examination. Sixth, time problem, all respondents did not have problem with the conducting of national examination when doing the items of national examination because it has examined in every subject.*

**Keywords:** *Implementation of National Examination Authorization*

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan titik berat pembangunan dalam memasuki era globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang mampu membawa manusia lepas dari berbagai keterbelakangan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah dituangkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat 1 dan 2 yang menekankan bahwa Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri dan Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pada hakekatnya, dalam sistem pendidikan nasional setiap warga masyarakat memiliki hak dalam proses pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dimana setiap peserta didik pada tiap satuan pendidikan berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat

dan kemampuannya. Pendekatan yang selama ini dilakukan adalah cenderung lebih sentralistik baik dalam proses penentuan kebijakan maupun operasionalisasinya, sehingga memberi dampak terbatasnya ruang partisipasi dan juga menurunkan kreativitas daerah.

Pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan mengartikan bahwa Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Teknik dan Instrumen Penilaian Instrumen, penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validasi

tas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan nasional dikembangkan dengan tujuan (1) Berkembangnya potensi keimanan dan ketakwaan. (2) terbentuknya akhlak mulia dikalangan para peserta didik. (3) membentuk peserta didik yang sehat jasmani dan rohani. (4) mencetak peserta didik yang berilmu. (5) mencetak peserta didik yang cakap. (6) pembentukan jiwa mandiri dikalangan para peserta didik.

Terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan proses pembangunan pendidikan, negara diberi amanat sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut harus dijabarkan secara tepat kedalam kurikulum, standar nasional pendidikan, program dan kebijakan pendidikan, proses pembelajaran, serta dalam sistem evaluasi. Permasalahannya sekarang adalah fungsi dan tujuan pendidikan nasional bukan saja tidak terjawab secara operasional dalam kegiatan pendidikan tapi juga seolah bersifat parsial terhadap program dan kebijakan pendidikan.

Untuk mewujudkan amanat tersebut Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan visi pendidikan Indonesia tahun 2025 yang isinya “ Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa

untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”.

Visi tersebut dikembangkan dalam misi pendidikan Indonesia dalam rangka mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas komprehensif dan kompetitif. Visi tersebut dikembangkan dalam tiga pilar pendidikan nasional yang meliputi (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik.

Pendidikan adalah merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara. Menurut undang-undang No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi anak agar memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan negara. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang mulia ini disusunlah kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan dan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Untuk melihat tingkat pencapaian tujuan pendidikan, diperlukan suatu bentuk evaluasi.

Dengan demikian, evaluasi pendidikan merupakan salah satu komponen utama yang tidak dapat dipisahkan dari rencana pendidikan. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua bentuk evaluasi dapat dipakai untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan, informasi tentang tingkat keberhasilan pendidikan akan dapat dilihat apabila alat evaluasi yang digunakan sesuai dan dapat mengukur setiap tujuan. Alat ukur yang tidak relevan dapat mengakibatkan hasil pengukuran tidak tepat bahkan salah sama sekali.

Ujian Nasional (UN) merupakan salah satu alat evaluasi yang dikeluarkan pemerintah untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ujian Nasional (UN) adalah sebuah kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan untuk menentukan standar mutu pendidikan di Negara Indonesia dengan mekanisme penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) oleh Pemerintah yang mematok standar nilai kelulusan 3,01 pada tahun 2002/2003 menjadi 4,01 pada tahun 2003/2004 dan 4,25 pada tahun 2004/2005, pada tahun 2005/2006 ditetapkan sebesar 4,25, pada tahun 2006/2007 ditetapkan sebesar 5,00, pada tahun 2007/2008 sebesar 5,25, pada tahun 2008/2009 sebesar 5,50, pada tahun 2009/2010 sebesar 5,50 dan pada tahun 2010/2011 sebesar 5,50. Penetapan standar kelulusan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor: 153 tahun 2003, nomor 22 tahun 2005, nomor 45 tahun 2006, nomor 34 tahun 2007, nomor 39 tahun 2008, nomor 75 tahun 2009, nomor 46 tahun 2010. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menetapkan standar kelulusan bagi siswa memang sangat baik untuk mendorong kualitas pendidikan, dan melalui Ujian Nasional (UN) pemerintah memiliki kepentingan untuk mengetahui kemampuan lulusan peserta didik dari berbagai jenjang dalam bidang kajian tertentu, sebagai indikator keberhasilan system pendidikan.

Standar kelulusan adalah patokan, dimana pada setiap tahun mengalami perubahan, standar tersebut perlu diketahui sampai dimana efektifitasnya. Untuk pengetahuan itu diperlukan sarana-sarana seperti ujian nasional atau evaluasi nasional, dan tidak meliputi seluruh standar isi karena sifatnya hanya sekedar untuk memberikan gambaran peta permasalahan pendidikan secara nasional, maka dipilihlah beberapa mata pelajaran yang esensial, seperti mata pelajaran bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Inggris.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

implementasi kebijakan pelaksanaan dan analisis hasil ujian nasional di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah. Sebagai panduan analisis, digunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grendle, yaitu 1) Respeknya Anggota Masyarakat Pada Keputusan Pemerintah; 2) Adanya Kesadaran Untuk Menerima Kebijakan; 3) Adanya Kepentingan Publik; 4) Adanya sanksi Hukum; 5) Adanya Kepentingan Pribadi dan 6) Masalah Waktu.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menurut Gama (1999: 32) mengemukakan bahwa: Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian guna memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tak memerlukan kuantifikasi, atau gejala-gejala tersebut tak memungkinkan diukur secara tepat.

Menurut Ridwan (2010: 51) menyatakan bahwa sebuah penelitian yang dimulai karena adanya masalah, dan masalah ini pada umumnya dimiliki oleh para administrator, manajer atau para pengambil keputusan pada suatu organisasi dinamakan penelitian kebijakan (*policy reseach*). Penelitian kebijakan adalah suatu proses penelitian yang dilakukan pada masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga hasil temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan kasus-kasus ditempat kerjanya.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah untuk melihat implementasi kebijakan pelaksanaan dan analisis hasil ujian nasional, serta lokasi ini dipilih dengan alasan efisiensi dan efektifitas pelaksana penelitian yang akan dilakukan.

Penentuan informan dilakukan secara *purposive* yaitu ditentukan secara sengaja. Adapun informan yang dipilih yakni Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Palu 1 orang, Ketua Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Kota Palu 1 orang, Sekretaris Penyelenggara

Ujian Nasional Dinas Pendidikan Kota Palu 1 orang, Kepala Sekolah 2 orang dan wali murid 2 orang. Jadi, informan secara keseluruhan berjumlah 7 orang.

Teknik pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Respeknya Anggota Masyarakat Pada Keputusan Pemerintah.

Kodrat manusia bila merujuk kepada filsafat politik John Locke, dikatakan memiliki *state of nature* yang berkarakter positif. Artinya bahwa masyarakat baik secara individu maupun kelompok dapat berinteraksi dengan baik, dalam artian bahwa dapat saling respek dan mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Kata kuncinya adalah masyarakat dapat memberikan penghargaan dan penghormatan kepada pemerintah tentang kebijakan pelaksanaan ujian nasional. Salah satu informan mengatakan bahwa pada prinsipnya kebijakan pelaksanaan ujian nasional dapat diterima dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

“Merilee S. Grendle (1980:6) menyatakan bahwa Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah, artinya bahwa manusia dapat menerima dengan baik hubungan relasional antar individu, ketika relasional ini berjalan dengan baik, logikanya bahwa ada sistem sosial yang menggerakkan seluruh warga untuk saling hormat-menghormati, memberikan respek pada otoritas orang tua, memberikan penghargaan tinggi pada ilmu pengetahuan, menghormati undang-undang yang dibuat politisi, mematuhi aturan hukum yang ditetapkan, mempercayai pejabat-pejabat pemerintah dan sebagainya”.

Selanjutnya semua informan mengatakan setuju tentang pelaksanaan ujian nasional, sebagaimana pernyataan informan berikut:

“Iya setuju, Karena UN memiliki tujuan yaitu, mengukur standar nasional apabila tidak ada UN maka, bagaimana mengukur kemampuan nasional setiap tahun. Hanya saja ada beberapa yang harus diperbaiki. Misalnya, jumlah mata pelajaran yang di UN kan. Sebaiknya mata pelajaran umum yang di UN kan misalnya, Kewarganegaraan, Pancasila, Cinta Negara atau pengetahuan mengenai Bangsa dan Kenegaraan. sedangkan mata pelajaran seperti, Biologi Fisika, Kimia ujiannya dilakukan di sekolah masing-masing saja”.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya UN, maka pemerintah dapat mengukur tingkat kemampuan daerah-daerah dalam melaksanakan UN dengan menggunakan suatu sistem yang sama di seluruh Indonesia yaitu, “standar nasional”.

Kemudian pola pelaksanaan ujian nasional tentang penentuan kelulusan 40% dari nilai sekolah dan 60% dari nilai ujian nasional, bahwa sebagian besar menyatakan sudah tepat, tetapi ada pula yang berpendapat sebaiknya pola penilaian dirubah, yaitu penentuan kelulusan bagi siswa sepenuhnya diserahkan ke sekolah dan tidak lagi bergantung pada hasil UN dari Pusat sebagaimana selama ini yang berlaku.

Saya berpendapat bahwa apapun model pelaksanaan ujian nasional yang dilaksanakan secara nasional dan serentak, dalam hal penentuan kelulusan harus dilakukan oleh sekolah karena proses pendidikan di Sekolah, guru lah yang secara langsung bersentuhan dengan siswa.

### Adanya Kesadaran Untuk Menerima Kebijakan.

Pada abad Postmodern saat ini banyak dijumpai masyarakat, baik masyarakat individu maupun masyarakat kelompok banyak

yang mau menerima dan melaksanakan sebuah kebijakan, tetapi ada pula masyarakat yang tidak mau menerima dan melaksanakan sebuah kebijakan. Dalam hal ini masyarakat yang merasa bahwa kebijakan itu logis dan rasional, maka mereka akan menerima dan melaksanakan kebijakan itu. Namun, ketika masyarakat itu merasa bahwa kebijakan itu tidak logis dan rasional, maka masyarakat tersebut pasti tidak akan mau menerima dan melaksanakan kebijakan tersebut. Olehnya itu, pemerintah harus banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan yang akan dikeluarkan, sehingga *mindset* masyarakat terhadap kebijakan dapat berubah dan mau menerima serta melaksanakan kebijakan tersebut. Kaitannya dengan kebijakan pelaksanaan ujian nasional, sosialisasi pemerintah terhadap hal tersebut dianggap sudah cukup dan sudah dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat, walaupun masih terdapat masyarakat yang masih mempertanyakan kebijakan ujian nasional, dengan alasan bahwa mengapa harus melaksanakan ujian nasional hanya untuk mata pelajaran tertentu, sementara mata pelajaran lainnya tidak menjadi mata pelajaran yang diujikan. Ini berarti bahwa murid-murid hanya akan dipacu untuk mempelajari mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional, sementara mata pelajaran lainnya tidak. Hal ini pula menjadi sebuah perbandingan sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan ujian nasional, dimana banyak murid atau siswa yang memperoleh nilai sepuluh untuk beberapa mata pelajaran karena yang dinilai betul-betul hasil ujian tersebut tanpa mempertimbangkan hal-hal lain seperti budi pekerti siswa, sikap dan perilaku siswa, sementara setelah dikeluarkannya kebijakan ini tidak ada siswa yang bisa memperoleh nilai sepuluh karena penilaiannya tidak semata-mata hasil ujian mata pelajaran tersebut, tetapi juga dinilai faktor lain seperti sikap dan perilaku siswa.

“Hal tersebut diatas diperkuat oleh Merilee S. Grendle (1980:6) yang menyatakan bahwa adanya kesadaran

untuk menerima kebijakan, yakni dalam masyarakat yang digerakkan oleh pilihan-pilihan yang rasional dimana didalam masyarakat dijumpai adanya masyarakat yang menerima dan melaksanakan kebijakan publik, tetapi terkadang ada pula masyarakat yang tidak mau menerima dan menjalankan kebijakan publik”.

Saya pun menanyakan kepada beberapa informan, apakah metode penilaian ujian nasional sudah tepat. Hal ini ditanggapi:

“Sudah tepat. Hanya saja masih ada yang perlu dibenahi. Pertama, sistem penilaian yang selama ini kelulusan siswa ditentukan oleh pusat, kedepan sekolah yang harus menentukan kelulusan siswa bukan dari pusat. Kedua, kelulusan siswa tidak lagi 100% siswa harus lulus UN akan tetapi pemerintah daerah dalam hal ini sekolah diberi kewenangan untuk menentukan lulus atau tidaknya siswa”.

Hal ini juga diperkuat oleh informan lainnya bahwa metode penilaian Ujian Nasional “belum tepat”. Karena nilai-nilai diluar hasil akademiknya tidak dimasukan sebagai nilai pertimbangan kelulusan bagi siswa. Memang benar bahwa sistem penilaian Ujian Nasional penentuan kelulusan ditentukan oleh pusat.

Selanjutnya informan yang lain mengatakan “belum tepat”. Karena nilai-nilai ujian nasional hanya diambil dari hasil ujian nasional dan yang seharusnya nilai ujian nasional juga diambil dari nilai-nilai ujian sekolah, seperti prestasi siswa di sekolah. Mulai tahun 2011, pelaksanaan ujian nasional telah mengambil nilai sekolah dari mata pelajaran yang diujikan dengan prosentase 40 % dari nilai sekolah dan 60 % dari hasil Ujian nasional. Namun demikian, penentuan siswa lulus atau tidak keputusannya dari pusat.

Kebijakan pelaksanaan ujian nasional bukan berarti masyarakat tidak dapat menerima tetapi penentuan kelulusan peserta didik bukan ditentukan semata dari hasil ujian

nasional, tetapi ada hal-hal yang menjadi pertimbangan sekolah, dalam hal ini yang paling mengetahui adalah guru. Namun, apapun model dari pelaksanaan ujian nasional sah-sah saja, tetapi penentuan kelulusan sebaiknya diserahkan ke sekolah.

### **Adanya Kepentingan Publik**

Ketika sebuah kebijakan publik itu dikeluarkan dengan sah, prosedural dan konstitusional serta dibuat oleh pejabat publik yang berwenang, maka masyarakat mempunyai keyakinan untuk mau menerima dan melaksanakan kebijakan itu dengan senang hati apalagi kebijakan itu menyangkut peningkatan mutu pendidikan atau berkaitan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak.

Kemudian apakah ujian nasional sudah memihak kepada rakyat, semua informan mengatakan “sudah”, seperti pernyataan informan berikut:

“sudah, karena semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam hal memperoleh pendidikan tanpa ada perbedaan.

Pemerataan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah selama ini telah dilaksanakan sedemikian baik, meskipun pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara serentak namun dapat dilaksanakan secara bertahap. Di sisi lain, masih terdapat perbedaan diantara siswa. Dari segi kemampuan ekonomi, hanya siswa dari keluarga mampu yang dapat menikmati fasilitas pendidikan seperti buku-buku, komputer dan fasilitas lainnya, sementara siswa yang tergolong kurang mampu belum dapat menikmati pendidikan dengan fasilitas yang sama. Dalam hal ini pemerintah harus menyediakan fasilitas belajar bagi siswa-siswa yang tergolong ekonomi lemah, misalnya menyediakan perpustakaan yang lengkap.

Pelaksanaan Ujian Nasional dilaksanakan secara serentak untuk menghindari adanya perpindahan siswa ke daerah lain, keseragaman ini dengan tujuan tidak membedakan siswa antar daerah sebagaimana didapatkan salah seorang informan: “sudah memi-

hak”, karena tidak terdapat perbedaan-perbedaan dan semua mempunyai hak yang sama untuk mengecap pendidikan serta ujian nasional.

Untuk pelaksanaan kebijakan ujian nasional, sebuah kebijakan dapat dikatakan adanya kepentingan publik apabila kebijakan itu sudah memihak kepada rakyat.

### **Adanya sanksi Hukum**

Implementasi kebijakan pelaksanaan ujian nasional telah dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia disemua sekolah baik itu swasta maupun negeri. Hal ini wajib untuk dilaksanakan karena sekolah yang tidak mematuhi atau tidak mau melaksanakan kebijakan tersebut akan mendapatkan sebuah sanksi hukum, yakni anak didiknya tidak dapat lulus karena dianggap tidak melaksanakan ujian nasional. Umumnya di Indonesia dan khususnya Sulawesi Tengah, belum terdapat sekolah yang menerima sanksi seperti yang disebut diatas karena telah melaksanakan ujian nasional dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara para informan yang mengatakan bahwa sejak adanya kebijakan pelaksanaan ujian nasional mereka selalu mengikuti kebijakan itu.

“Merilee S. Grendle (1980: 6) menyatakan bahwa Adanya Sanksi Hukum yakni, orang akan sangat terpaksa mengimplementasikan dan melaksanakan suatu kebijakan karena ia takut terkena sanksi hukuman, misalnya denda, kurungan dan lain-lain”.

Pada pelaksanaan ujian nasional sanksi hukum memang belum diatur pada POS (Prosedur Operasional Standar). Kenyataannya bahwa peserta didik tidak mengikuti salah satu mata pelajaran baik itu utama maupun susulan, maka peserta didik tersebut dipastikan tidak lulus. Namun, didalam pelaksanaan ujian nasional jika ditemukan suatu pelanggaran, maka akan diselesaikan secara hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan sanksi terhadap siswa yang menyontek, maka salah satu informan

berpendapat “sanksinya akan tetap ada, bagi siswa mungkin akan diberikan ujian susulan dengan sistem pengawasan yang ekstra ketat. Selain itu, tentu akan diberikan pemahaman moral yang lebih mendidik. Hal ini juga diperkuat salah satu informan, yakni “kita harus mengikuti aturan yang berlaku”. Diatambah lagi informan lainnya yang menyatakan “sangat setuju”. Dilihat dari oknumnya misalnya siswa, sanksi yang diberikan harus mendidik dan apabila pelakunya guru, itu tergantung dari dinas pendidikan untuk memberikan sanksi yang sesuai. Namun, menegenai adanya isu kebocoran soal sangat tidak mungkin terjadi karena pemerintah melakukan pengawasan berlapis terhadap kerahasiaan soal ujian nasional.

### **Adanya Kepentingan Pribadi**

Dalam sebuah implementasi kebijakan, terkadang ada seseorang atau sekelompok orang yang merasa diuntungkan dengan kebijakan tersebut maka dengan senang hati mereka mau menerima dan melaksanakan kebijakan itu. Untuk implementasi kebijakan pelaksanaan ujian nasional tidak ada seseorang atau sekelompok orang yang merasa diuntungkan karena kebijakan ini terkait dengan kebijakan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia yang terus menerus diperbaiki oleh pemerintah dan dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

“Merilee S. Grendle (1980;6) menyatakan bahwa adanya kepentingan pribadi yakni, seseorang atau kelompok orang sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu kebijakan, maka dari itu dengan senang hati mereka akan menerima, mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut”.

Pada penelitian ini tidak ada satupun informan mengatakan bahwa pelaksanaan ujian nasional ada terselip kepentingan pribadi seperti dinyatakan salah satu informan: “Berbicara mengenai adanya kepentingan pribadi atau golongan, sebagai kepala sekolah saya tidak berani menjawab akan hal itu karena

harus ada bukti yang kuat, jadi bijak saja. Selanjutnya informan ini juga berpendapat bahwa “Untuk didaerah kita Kota Palu ini kami belum melihat adanya kepentingan pribadi pada pelaksanaan Ujian Nasional sekarang ini. Pada point ini semua informan mengatakan pada pelaksanaan ujian nasional tidak ada kepentingan pribadi yang terselip, sebagai mana informan mengatakan ” Tidak ada, masalahnya sulit dibuktikan.

### **Masalah Waktu**

Apabila masyarakat memandang ada sebuah kebijakan yang bertolak belakang dengan kepentingan publik, maka masyarakat akan cenderung untuk menolak kebijakan itu, tetapi apabila waktu telah berlalu dimana masyarakat pada awalnya menolak kebijakan tersebut akan berubah menjadi kebijakan yang wajar dan dapat diterima sebagai kebijakan yang wajar. Berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan ujian nasional sampai saat ini masih dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat, seperti hasil wawancara yang dilakukan pada informan dimana mereka mengatakan bahwa kebijakan pelaksanaan ujian nasional ini “baik” dalam peningkatan mutu pendidikan. Masalah waktu, peneliti menanyakan kepada semua informan tentang waktu atau lamanya siswa dalam mengerjakan soal pada tiap mata pelajaran. Siswa dalam mengerjakan mata pelajaran eksakta lebih lama waktunya dibanding dengan mata pelajaran non eksakta.

Pertanyaan lain yang diajukan pada semua informan yakni pada pelaksanaan ujian nasional waktu mengerjakan soal-soal itu  $\pm$  120 menit tiap mata pelajaran apakah sudah tepat? Dan mereka pun menjawab “sudah tepat” karena disesuaikan dengan mata pelajaran. Ada juga yang berkomentar “Saya mengamati waktu yang digunakan itu sudah cukup, hanya saja anak-anak yang kurang lincah membaca dan itu yang agak mendapat kesulitan, tapi itu tidak berarti. Selanjutnya informan juga memberikan pendapat bahwa”120 menit adalah waktu yang sangat singkat dan

kurang efisien untuk menjawab soal-soal ujian. Namun itu adalah waktu yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia saya menyarankan agar pembuatan soal terutama wacana-wacana dalam soal mata pelajaran bahasa Indonesia sebaiknya jangan terlalu panjang, karena dengan membaca saja dibutuhkan waktu yang cukup banyak apalagi menganalisa soal-soal dan wacana.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Kebijakan pelaksanaan ujian nasional dapat dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, sekaligus untuk dapat menilai kemampuan siswa tanpa melihat status sekolah apakah itu swasta atau Negeri, dapat diterima dengan baik. Berkaitan dengan kewenangan penentuan kelulusan 60 persen pusat dan 40 persen Sekolah, sebaiknya dirubah dengan penentuan kelulusan siswa diberikan kewenangan sekolah 60 persen dan pusat 40 persen, dengan pertimbangan bahwa yang paling banyak mengetahui tentang sikap, perilaku, dan moral seorang siswa adalah guru siswa yang bersangkutan sehingga sangat wajar jika sekolah diberikan kewenangan seperti lebih besar dibanding pusat.
2. Bahwa Analisis Hasil Ujian Nasional pada tingkat SMA menunjukkan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai sepuluh dari jurusan Bahasa, IPS, IPA.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abidin. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancar Siwah.
- Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian* (suatu pendekatan praktek). Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdurrahman. 2003. *Memahami dan Menangani Siswa dengan Problema dalam Belajar, Pedoman Guru*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Cheema, Rondinelli. 1983. *Development Project As Policy Experiment: An Adaptive Approach to Development Administration*. London: Mathuen.
- Dedy, Mulyasana. 2011. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Edwar III. 1980. *Implementing Public Policy Press*. Washington DC.
- Fathan A. 2005. *Konsep dan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: PPS-UM.
- Gazali Lembah, dkk. 201. *Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan*. Laporan Penelitian Palu.
- Hamdi. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balai Buku Indonesia.
- Hendry, Nicolas. 1988. *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Rajaeali Perss.
- Hidayat. 1986. *Pengukuran Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Balai Buku Indonesia.
- Islamy. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Bahasa Indonesia. 1993. 626 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 59 tahun 2011 tentang Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional Keban Y.T. 1995. *Administrasi Publik*. Yog-jakarta: Gava Media.
- Mazmanian, A Sabatier. 1994. *Implementation and Public Policy*. New York: Haerpercolins.
- Meter Van, Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*”, dalam *Administrasi and Society*. London: Sage.
- Mustopadijaya. 2003, *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: LAN.
- Muksin dkk. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Alex Media Kumputindo.



- Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Ridwan. 2010. *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, 2010. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santoso. 1998. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Schemerh, John R Jr. 1986. *Efektivitas*. Bandung: Sulita.
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulaeman. 1975. *Publik Police Kebijakan Pemerintah*. Jakarta BKU-IIP.
- Sunggono. 1994. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: PSKK-UGM.
- Wahab, 2005, *Analisis Kebijakan* PT. Bumi Aksara Jakarta
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.